



**Penundaan Pengesahan
APBD-P Dinilai Tepat**

Harus Hati-hati Gunakan Uang Negara

PONTIANAK-RK. Langkah Sutarmidji yang meminta penundaan pengesahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2018 dinilai tepat. Apalagi jika Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih tidak dilibatkan saat pembahasan.

"Jadi karena beliau tidak ikut di dalam pembahasan dan mengkaji saya kira wajar kalau beliau minta waktu," ujar Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Ali Nasrun ketika dihubungi Rakyat Kalbar, Rabu sore (12/9).

Pasalnya kata dia, Midji-Norsan baru beberapa hari menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Kecuali kalau memang sebelumnya mereka sudah dilibatkan.

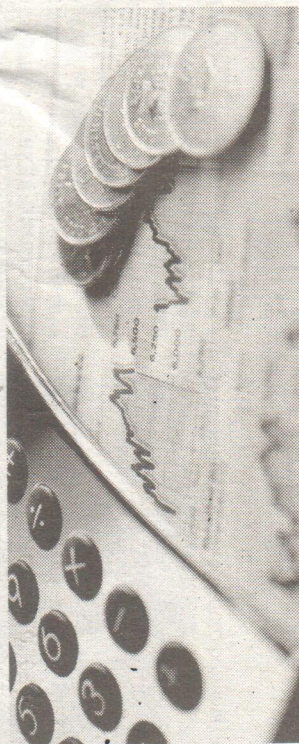
"Penundaan bukan berarti akan menghentikan sistem pemerintahan di Pemprov Kalbar. Dalam artian, akan menggunakan anggaran yang lama," tuturnya.

Ali pun setuju dengan permintaan Midji untuk dilakukan audit ulang rancangan APBD-P 2018. "Itu adalah ciri dia. Pada saat jadi Wali Kota (Pontianak) sangat hati-hati dengan hal yang berkaitan uang negara," sebutnya.

Halaman 4



Harus Hati-hati Gunakan Uang Negara



periode ini mengakui, saat memasuki masa awal pemerintahannya langsung dihadapkan masalah yang berat. Yakni defisit anggaran. "Kemarin ribut masalah potensi defisit. Saya tegaskan itu bukan potensi, tapi riil. Ini berat," sebutnya.

Midji akan cari penyebab kenapa terjadi defisit APBD Kalbar Tahun 2018. Termasuk, mencari treatment penanganan masalah defisit itu.

"Jangan sampai akhir masa jabatan, kami tidak bisa apa-apa selain menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang," tegasnya.

Midji tidak mau masalah defisit ini mengganggu implementasi visi-misi dengan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan. Mereka ingin semua yang disampaikan (saat kampanye) terwujud. "Tidak mau terganggu defisit besar," lugasnya.

Kalau Rp380 miliar saja, berarti setara dengan 50 persen belanja modal. Itu tentu saja suatu keniscayaan dan merepotkan. "Itu akan kita selesaikan," tukas Midji.

Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi

Dia juga sependapat dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar baru, bahwa apapun perubahan itu sepenuhnya adalah untuk kebaikan rakyat. Tidak ada pemotongan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu harus diprioritaskan. "Kita penduduk Kota Pontianak sudah paham lah dengan cara dia yang sangat hati-hati dengan uang negara," ucap Ali.

Dia juga yakin penundaan ini tidak mungkin teralalu lama. Karena Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena jika terlalu lama, juga bukan hal yang baik. Tetapi jika tidak mempelajari dan memahami apa yang akan ditangani juga tak benar.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak ini juga sepakat dengan tujuan rancangan APBD 2019. Yaitu harus sesuai dengan visi misi pada saat kampanye pemimpin Kalbar yang baru. Jika tak sesuai dengan janji kampanye, tentu dianggap rakyat tidak benar. "Tahun 2019 itu juga suatu hal yang benar kalau

"Kita masih kaji. Karena saya masih baru dan langsung disuruh tandatangan untuk hal yang belum saya pelajari," ujar Midji saat diwawancarai awak media usai sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian pidato pertama Gubernur Kalbar masa jabatan 2018-2023 di ruang Balairung Sari, Kantor DPRD Kalbar, Senin (10/9).

Kalau tidak sesuai, dia minta tunda satu atau dua minggu untuk pihaknya selesaikan. Sebab dirinya tidak ingin ada efisiensi ataupun belanja yang tidak direncanakan sebelumnya. "Karena itu melanggar aturan," tegasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua

menyesuaikan dengan kampanye beliau," tuturnya.

Janji kampanye tentu tidak dibuat sendiri. Dibuat berdasarkan penggunaan jangka panjang.

"Pada tahap 5 tahun yang ingin beliau wujudkan sesuai dengan janji kampanye kepada rakyat Kalbar yang memilih maupun tidak memilih. Begitu juga pemerintah RI," demikian Ali.

Sebelumnya, Midji meminta penundaan waktu rencana pengesahan APBD-P Tahun 2018 selama satu atau dua minggu. Sebelumnya, agenda itu dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kalbar pada Rabu (12/9).